

**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, OPTIMALISASI ASSET, PROFESIONALISME DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA**
(Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)

Nur Chamidayati, Rani Eka Diansari
Program Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta

nchamidayati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to prove whether local government support, asset optimization, professionalism, and community authorization will affect the village's original income. The population used in this study were all villages in the Salam District, Magelang Regency. The samples used in this study were 85 respondents using purposive sampling method and data analysis techniques, and using the SPSS version 25 computer application to perform regression analysis. The results of this study prove that local government support, asset optimization, professionalism and community authorization have an effect on village original income.

Keywords: *local government support, asset optimization, professionalism, community empowerment, village original income*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme, dan otorisasi masyarakat akan berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh desa di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 85 responden menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis data, serta menggunakan aplikasi komputer SPSS versi 25 untuk melakukan analisis regresi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme dan otorisasi masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Kata Kunci: Dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme, pemberdayaan masyarakat, pendapatan asli desa

PENDAHULUAN

Indonesia disatukan menjadi satu negara berbentuk republik, terdiri dari banyak daerah. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan pada instansi pemerintah Indonesia yang berhak merencanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syamsi, 2015). UU No. 6 tahun 2014 mengatur semua konten yang terkait dengan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa bukan hanya menjadi objek pembangunan akan tetapi menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan (Hoesada 2014). UU ini diterapkan dengan tujuan agar semua pihak dapat melakukan perubahan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan

desa (Ismail, 2016). Penerapan UU tersebut perlu diimbangi adanya kemampuan dari aparat desa dan sikap responsif dari masyarakatnya (Sutaryo, 2016).

Pengelolaan dana desa dapat dengan mudah tercapai dengan dukungan pemerintah daerah (Atmadja dan Saputra, 2017). Pemerintah daerah mendukung peningkatan PADesa dalam bentuk fasilitas dan sinergi (Saputra et al., 2018). Mengoptimalkan aset milik desa juga perlu dilakukan untuk menambah pendapatan dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Aset desa diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa di masa yang akan datang.

Mengingat pengelolaan aset desa itu penting, maka pengelolaan harus dilakukan

secara profesional. Profesionalisme yaitu sikap, keadaan maupun kemampuan aparatur dalam mengklasifikasikan aset desa serta memberikan suatu pelayanan maupun pemberdayaan bagi masyarakat sehingga, diperlukan suatu keahlian aparatur desa melalui pendidikan maupun pelatihan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan program pelayanan (Sedarmayanti, 2004 & Riyanto, 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan kemandirian dan upaya kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan kebijakan, rencana, kegiatan atau pendampingan, dengan meningkatkan pengetahuan, sikap / perilaku, keterampilan dan kemampuan pemanfaatan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan desa agar pembangunan dapat terealisasi (Yabbar, 2015).

Penelitian ini menarik karena pertama, ada ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. Penelitian Hasfi (2013) dan Natalia et al. (2017) menunjukkan bahwa profesionalisme pengelolaan aset desa tidak mempengaruhi pendapatan asli desa, sedangkan penelitian Riyanto (2014) dan Saputra et al. (2019) memperlihatkan bahwa profesionalisme mempengaruhi pendapatan asli desa. Kedua, pemanfaatan aset desa yang tidak maksimal dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa (Sutaryo, 2016). Ketiga, rendahnya kepedulian dari masyarakat terhadap peningkatan pendapatan asli desa (Putri, 2017). Keempat, tahun 2020 ini penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan sebesar Rp269 miliar dari jumlah realisasinya Rp222,4 miliar atau 83,77 persen dialami Kabupaten Magelang disebabkan wabah covid-19 sehingga mengakibatkan pelemahan sistem ekonomi (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/>). Berdasarkan uraian di atas, itulah peneliti tertarik meneliti “dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme dan otorisasi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli desa” pada

pemerintahan desa di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

LANDASAN TEORI & HIPOTESIS

Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah, pendapatan asli daerah mengacu pada pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Dalam rangka menanggung sebagian pengeluaran yang dibutuhkan oleh pemerintah dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya, maka pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan, dan pengeluaran ini meningkat dari tahun ke tahun sehingga otonomi daerah yang luas, benar dan bertanggung jawab dapat tercapai (Darise, 2016).

Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber asli pendapatan daerah diperoleh dari pajak daerah, pajak daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah tersendiri serta hasil PAD legal lainnya. Sumber pendapatan PAD harus terus diupayakan untuk mendanai belanja harian dan belanja pembangunan daerah di era otonomi daerah. Perpajakan daerah asli bertujuan untuk mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah berdasarkan potensi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang diterima dari perangkat desa berdasarkan hak atas sumber dan hak asal usul desa. Pendapatan asli pedesaan meliputi hasil usaha, aset, partisipasi swadaya, gotong royong dan pendapatan desa lainnya

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan merumuskan dan melaksanakan undang-undang di daerah tertentu. Pemerintahan dalam arti luas berarti tugas organisasi menjalankan sistem pemerintahan (eksekutif, legislatif

dan yudikatif). Secara garis besar, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kebijakan mengatur dan menyelenggarakan sistem pemerintahan. (Rantung, 2018).

Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 menurut asas otonomi dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan DPRD. Daerah merupakan kesatuan masyarakat dengan batas wilayah tertentu dan memiliki hak, kekuasaan dan kewajiban untuk mengelola dan mengurus wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.,

Optimalisasi Asset

Optimalisasi merupakan pengoptimalan pemanfaatan potensi suatu aset yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan (Nugent, 2017). set dapat dikelompokkan menurut sektor unggulan (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang) yang menjadi dasar strategi pembangunan ekonomi negara. Kriteria dapat mengelompokkan harus dapat diukur dan transparan. Di saat yang sama, aset yang tidak bisa dioptimalkan harus dicari penyebabnya. Mengoptimalkan aset harus dibuat strategi agar terhindar dari ancaman faktor lingkungan (Siregar, 2019). Mengoptimalkan aset berarti mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, kuantitas, potensi hukum dan ekonomi dari proses pengelolaan aset. Pengoptimalan aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset dapat dioptimalkan dan cara mengoptimalkannya.

Profesionalisme

Pengertian profesi ada dua yaitu janji dan pekerjaan. Secara garis besar, profesi adalah suatu kegiatan mencari nafkah dan membutuhkan tingkat keahlian tertentu. Profesi dalam arti sempit adalah kegiatan yang didasarkan pada keahlian tertentu dan

berdasarkan norma sosial yang baik. (www1.bpkpenabur.or.id).

Profesionalisme mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang berkualitas, tepat waktu dan serius yang mudah dipahami dan mudah diikuti oleh publik (Kurniawan, 2015). Profesionalisme di sini bertujuan pada kemampuan untuk memberikan layanan yang baik, adil, dan inklusif, bukan hanya untuk menyesuaikan pengetahuan profesional dengan tempat kerja. (Dewi, 2018).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat, serta berupaya membangun citra masyarakat seluas-luasnya agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2018). Menurut Sumaryadi (2015) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan Badan Usaha Milik Desa dapat dijadikan Subjek kekuatan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa. (Ulinnucha, 2016).

Perumusan Hipotesis

Dukungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli desaa

Dukungan pemerintah daerah diperlukan Pemerintah Desa pada setiap kegiatan desa, salah satunya untuk mengetahui potensi desa dan mengembangkan BUMDesa. Penelitian Atmadja dan Saputra (2017) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah akan berpengaruh pada pengelolaan dana desa. Kajian Saputra dan Julianto (2016) juga menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa telah ditunjukkan dalam bentuk rancangan APBD melalui pengawasan, yang selanjutnya harus ditetapkan dan dievaluasi oleh kepala desa.. Maka dari hasil penelitian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H1: Dukungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Optimalisasi Aset berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa

Menurut Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, pengelolaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi dibutuhkan guna memperoleh hasil yang maksimal (Natalia, 2017).

Hasil penelitian Widya (2010) menunjukkan bahwa optimalisasi aset daerah akan mempengaruhi inventarisasi dan pelabelan aset. Hal itu dapat diartikan bahwa dengan dilakukan inventarisasi dan identifikasi menggunakan sistem yang baik optimalisasi pemanfaatan aset desa mempunyai potensi dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Hasil penelitian Natalia et al. (2017) juga menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan aset berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa. Maka dari hasil penelitian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H2: Optimalisasi penggunaan aset desa berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa

Profesionalisme bukan sekedar kesesuaian keahlian dengan tempat penugasan namun kemampuan untuk memberikan layanan yang baik, adil dan inklusif (Canaldhy, 2019). Penelitian Riyanto (2014) menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Artinya, profesionalisme dapat berdampak pada pendapatan asli desa. Penelitian Zainal (2012) juga menunjukkan bahwa dari kenaikan pajak daerah terlihat bahwa pengelolaan aset daerah mempunyai pengaruhh pada kinerja pemerintah daerah. Maka dari berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis:

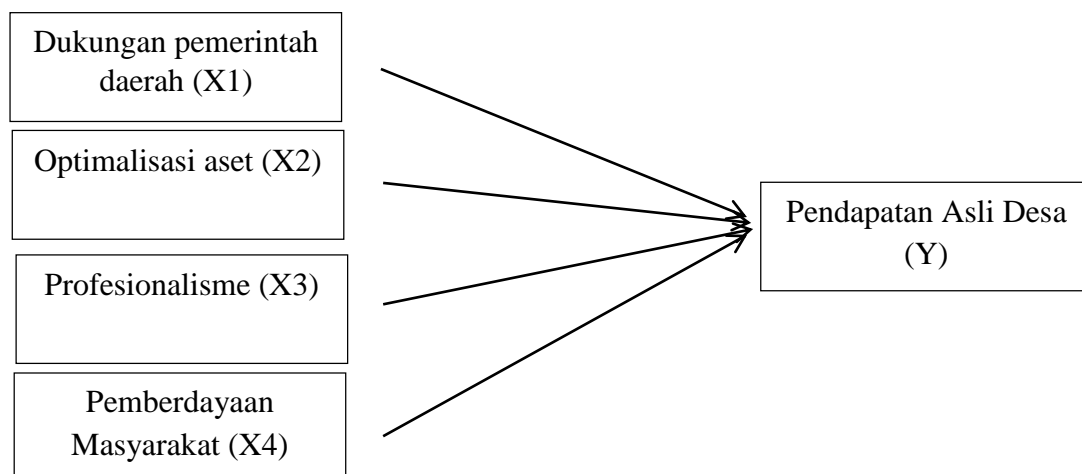
H3: Profesionalisme pengelolaan aset desa berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan pendapatan asli desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing masyarakat guna mendukung kemandirian ekonominya (Sugiyarsih, 2019) Penelitian yang dilakukan oleh Faini (2016) menunjukkan bahwa Badan pemberdayaan masyarakat pedesaan berdampak pada pembangunan Desa Kedunglumpung di Kabupaten Jombang Kecamatan Mojoagung. Maka dari hasil penelitian diatas, peneliti mengajukan hipotesis:

H4: Pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan asli Desa.

KERANGKA BERPIKIR



Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian kuantitatif, tentang dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu perangkat desa di wilayah Salam, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah desa di kecamatan Salam kabupaten Magelang.
2. Aparat desa bertugas sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Wilayah.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Desa

Sumber pendapatan asli desa ditetapkan sebagai indikator pendapatan asli desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan asli desa yaitu hasil operasi desa, pengelolaan kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan hasil pendapatan desa yang sah lainnya. Jumlah kuisioner adalah 6, menggunakan skala likert 1-5 yang berkisar dari batas bawah (1) skala dari "sangat rendah" sampai yang tertinggi (5). Batas atas skala (5).

Optimalisasi aset

Pengoptimalan aset menggambarkan alur kerja pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset, seperti optimalisasi potensi fisik, lokasi, nilai, kuantitas / kuantitas, hukum dan ekonomi. Menurut Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020) Optimalisasi Aset diukur 3 indikator antara lain : mengembangkan database, menggunakan aset dengan nilai tertinggi, dan merumuskan strategi optimalisasi aset.

Profesionalisme

Profesionalisme mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang berkualitas, tepat waktu dan serius yang mudah dipahami dan mudah diikuti oleh publik Menurut Sedarmayanti dalam (Fitri Wirjayanti, 2014) profesionalisme diukur dengan menggunakan 4 indikator antara lain: kompetensi, efektivitas, efisiensi, dan bertanggung jawab.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya agar masyarakat dapat mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Menurut Riant, N. (2008) indikator pemberdayaan masyarakat yaitu akses, partisipasi, kontrol dan kesetaraan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yaitu penyelenggara urusan pemerintahan daerah berdasarkan

dasar otonomi dan tanggung jawab sesuai dengan kesatuan sistem dan prinsip sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dukungan pemerintah daerah diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan terkait desa
- 2) Pembinaan alokasi dana desa
- 3) Upaya peningkatan kemampuan aparatur desa
- 4) Manajemen terhadap pemerintahan di desa
- 5) Pembinaan dalam mempercepat pembangunan pedesaan dan memberikan bimbingan teknis
- 6) Mengawasi penetapan RAPBD pembiayaan desa
- 7) Pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Peraturan dan pembangunan desa
- 8) Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- 9) Menentukan metode pembiayaan untuk penyaluran sisa dana di desa
- 10) Pembinaan dan pengawasan tata kelola desa yang baik

Teknik Analisis Data

Sebelum menganalisis data, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya serta uji hipotesis klasik (uji normal). Sementara itu, untuk menguji apakah variabel dukungan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, profesionalisme pengelolaan aset dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa

Menggunakan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinan berganda (R^2), uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parameter tunggal) dengan menggunakan software SPSS 25.

Hasil dan Pembahasan

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang berasal dari Pemerintah Desa Kecamatan Salam. Data yang dikumpulkan dari kuesioner pada perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala desa, sekertaris desa, kaur, kasi, dan kepala wilayah di 12 Desa dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 96 kuesioner. Terdapat 85 kuesioner yang dapat diproses, 3 kuesioner yang tidak dapat diproses, dan 8 kuesioner yang tidak dapat dikembalikan.

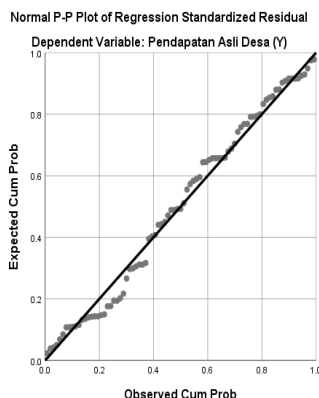
Analisis Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan pada angket pernyataan diperoleh dari variabel dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, tingkat profesionalitas, pemberdayaan masyarakat, dan pendapatan asli desa adalah valid. Sedangkan berdasarkan pengujian reliabilitas seluruh variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini telah reliabel atau handal. Hal ini dibuktikan seluruh nilai *Cronbach's alpha* $> 0,70$, maka seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian layak untuk digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2 Diagram Normal P-plot

Berdasarkan diagram P-plot dapat disimpulkan bahwa titik-titik pada grafik tersebut mendekati atau mengikuti garis diagonal, dan disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Tabel Uji Hipotesis

Variabel	B	P Value	Hasil
<i>Constant</i>	1,426		
Dukungan pemerintah daerah (X1)	0,308	0,000	H1: Didukung
Optimalisasi asset (X2)	0,231	0,041	H2: Didukung
Profesionalisme(X3)	-0,187	0,007	H3: Didukung
Pemberdayaan Masyarakat (X4)	0,350	0,000	H4: Didukung
F Hitung = 25,629			
Signifikansi F = 0,000			
Adjusted R Square = 0,540			
Signifikansi 5%			

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,426 + 0,308 X1 + 0,231 X2 - 0,187 X3 + 0,350 X4 + e$$

Persamaan regresi linier berganda pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta 1,426 menunjukkan variabel dukungan pemerintah daerah, optimalisasi asset, profesionalisme dan pemberdayaan masyarakat bersifat konstan, maka nilai variabel dependen pendapatan asli desa sebesar 1,426.

b) Variabel dukungan pemerintah daerah (X1) memiliki koefisien positif dengan nilai sebesar 0,308, dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima yang artinya variabel dukungan pemerintah daerah (X1) memiliki berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Nilai beta yang didapatkan yaitu positif sebesar 0,308 menunjukkan adanya hubungan positif dengan pendapatan asli desa, dimana apabila terjadi peningkatan 1 poin dukungan

- pemerintah daerah maka pendapatan asli desa akan meningkat sebesar 0,308.
- c) Nilai koefisien positif variabel optimalisasi aset (X2) sebesar 0,231, dan nilai signifikansi 0,041 < 0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima yang berarti koefisien variabel optimasi aset (X2) berpengaruh pada pendapatan asli desa. Nilai beta yang didapatkan yaitu positif sebesar 0,231 menunjukkan adanya hubungan positif dengan pendapatan asli desa, dimana apabila terjadi peningkatan 1 poin optimalisasi aset maka pendapatan asli desa akan meningkat sebesar 0,231.
 - d) Nilai koefisien regresi negatif variabel profesional (X3) sebesar -0,187, dan nilai signifikansinya 0,007 < 0,05. Hipotesis ketiga (H3) diterima yang artinya variabel profesional (X3) berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Nilai beta yang didapatkan yaitu negatif sebesar -0,187 menunjukkan adanya hubungan negatif dengan pendapatan asli desa, dimana apabila terjadi peningkatan 1 poin profesionalisme maka pendapatan asli desa akan menurun sebesar 0,187
 - e) Variabel pemberdayaan masyarakat (X4) memiliki koefisien positif dengan nilai sebesar 0,350 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis keempat (H4) diterima yang berarti variabel pemberdayaan masyarakat (X4) berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Nilai beta yang didapatkan yaitu positif sebesar 0,350 menunjukkan adanya hubungan positif dengan pendapatan asli desa, dimana apabila terjadi peningkatan 1 poin optimalisasi aset maka Pendapatan asli desa akan meningkat sebesar 0,350.

Tabel diatas, nilai Adjusted R-square adalah 0,540 sehingga, dapat ditarik sebuah kesimpulan variabel independen dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme dan pemberdayaan masyarakat dapat mempengaruhi variabel dependen pendapatan asli desa sebesar 54% dan selebihnya 46% tidak dijelaskan pada penelitian ini

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai hasil uji f menunjukkan f hitung sebesar 25,629 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka ditarik disimpulkan bahwa variabel independen yaitu dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Salam.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah di uji menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel ini adalah $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Variabel dukungan pemerintah daerah mempengaruhi pendapatan asli desa di Kecamatan Salam. Sinergitas serta dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya menunjang pengelolaan dana desa serta peningkat PADesa meliputi fasilitas maupun dalam hal membangun sinergitas (Atmaja, 2017 & Saputra, et al., 2018). Hal ini didukung oleh Atmadja & Saputra (2017) dan Anggiriawan et al., (2019) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah daerah mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa

2. Pengaruh Optimalisasi Aset terhadap Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah di uji menunjukkan bahwa optimalisasi aset berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Variabel ini memperoleh nilai signifikan $0,041 < 0,05$ maka, hipotesis kedua yang diajukan diterima. Dimana untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa optimalisasi aset mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Salam. Optimalisasi aset suatu gambaran

mengenai proses kerja pengelolaan aset guna mengoptimalkan potensi fisik aset, lokasi dan nilai aset, jumlah dan kuantitas aset, legalitas dan nilai ekonomis. Optimalisasi pemanfaatan asset desa mempunyai suatu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui inventarisasi maupun pengidentifikasian dengan mempergunakan suatu sistem yang telah dirancang (Widya, 2010). Hal ini didukung oleh Prayudi et al. (2017), Widayanti (2010) dan Sundari (2014) yang menunjukkan bahwa optimalisasi aset akan mempengaruhi pendapatan desa.

3. Pengaruh Profesionalisme terhadap Pendapatan Asli Desa

Mengacu pada hasil analisis yang telah di uji menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Variabel ini mempunyai nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ maka, menunjukkan variabel profesionalisme pengelolaan aset mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Salam. Profesionalisme merupakan suatu keandalan dalam melaksanakan suatu tugas agar dapat berjalan sesuai dengan kualitas, tepat waktu, ketepatan, dan prosedur yang mudah dipahami masyarakat. (Kurniawan, 2015). Profesionalisme dapat meningkatkan kinerja yang berdampak pada pendapatan desa (Riyanto, 2014). Hal ini didukung Dewi, et al., (2018) membuktikan variabel profesionalisme akan mempengaruhi pendapatan asli desa.

4. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah di uji menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat mempengaruhi variabel pendapatan asli desa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hipotesis keempat diterima. Dimana

variabel pemberdayaan masyarakat berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa di Kecamatan Salam. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi upaya meningkatkan keahlian masyarakat untuk mempunyai daya saing sebagai upaya dalam menunjang suatu kemandirian dalam pekonomian (Sugiyarsih, 2019). Penelitian ini didukung oleh Faini (2016) memperlihatkan variabel pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat mempengaruhi pendapatan asli desa

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme dan otorisasi masyarakat berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini dilakukan saat adanya pandemi, sehingga sampel responden kurang maksimal dalam pengisian kuesioner.
2. Penelitian ini dalam pengambilan data hanya menggunakan kuesioner, hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian karena perbedaan maksud responden dengan peneliti sehingga sedikit kemungkinan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Pada penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu: dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset, profesionalisme, dan pemberdayaan masyarakat sedangkan dari hasil uji R^2 terdapat 46 % yang dapat dijelaskan oleh variabel lain dalam penelitian ini.

SARAN PENELITIAN

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian beserta sampel agar dapat menjadi acuan bagi kepentingan generalisasi hasil penelitian.
2. Metode wawancara dapat dilakukan langsung dengan responden untuk menghindari kemungkinan pengisian kuesioner tidak obyektif serta

memperoleh gambaran permasalahan secara lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2016). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 7-16.
- Atmadja, AT, & Saputra, KAK (2018). Faktor penentu yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akademi Manajemen Strategis*, 17(1), 1-9.
- Canaldhy, RS (2019). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta (Studi Kasus Kantor Catatan Sipil). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 1(1).
- Darise, Nurlan. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Indeks
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2(2).
- Faini, Rohmatin Nur dan M Farid Ma'ruf, (2016). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mendukung Pembangunan Desa Kedunglumpung Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1).
- Fitri Wijayanti Undjila. 2014. Pengaruh Kedisiplinan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo (SKRIPSI). Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IMB SPSS 25 (Sembilan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hoesada, J. 2014. "Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)." KSAP. 2014.
- Hasfi, N. (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang) (Doctoral dissertation, Tanjungpura University). <https://jatengprov.go.id/beritadaerah>
- Widagdo, AK, Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). Implementasi Good Governance Dalam Proses Transfer Aset Pemerintah Daerah Kota Sumedang. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 1-24.
- Natalia, Y.S., Sulindawati, N.L.G.E., Atmadja, A.T. (2017). Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 7(1)
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019
- Putri, Y. E., & Bawono, A. D. B. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rantung, W. S., Sumampow, I., & Rengkung, F. (2018). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Desa Tentang Aturan Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Riant, N. (2008). Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto, A. (2014). Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Dan Motivasi

- Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sukabumi. *SNIT 2014*, 1(1), 33-41.
- Saputra, KAK, Anggiriawan, PB, & Sutapa, IN (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Bawal Widya Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. K., & Anggiriawan, P. B. (2019). Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Aset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1).
- Saputra, KAK, Pradnyanitasari, PD, Priliandani, NMI, & Putra, IGBNP (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk mencegah penipuan dalam pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168-176.
- Siregar Doli, D. (2004). Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. *Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Sugiyarsih, S. (2019). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Cendekia Jaya*, 1(1), 46-51.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Sutaryo, S. (2016). Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 153-175.
- Syamsi, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Ulinnucha, M. F., Susilowati, E., & Saptono, H. (2016). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kab. Semarang dan Kab. Magelang). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-19.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widayanti, Endang. (2010). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa. *Penerbit: Pustaka, Surabaya*.
- Zainal, Nur Iswahyudi. (2012). Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Artikel, Universitas Negeri Gorontalo.